



Radar Bali

Monev Penerima Hibah oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

Klungkung

64 Penerima Hibah Belum Setorkan SPJ, Bahkan Ada yang Masih Pesan Pelinggih

Dari total 282 penerima bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan dari APBD Perubahan 2017 yang mencapai Rp 21 miliar, pasalnya hingga saat ini ada sebanyak 64 penerima hibah yang belum menyetorkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal SPJ paling lambat disetorkan pada 10 Januari 2018. Kok bisa?

DEWA AYU, Semarapura
DINAS Kebudayaan Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Klungkung sudah menggelar monitoring dan evaluasi ke lapangan. Ternyata 64 penerima hibah itu belum menyetorkan SPJ karena belum menyelesaikan kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan dana hibah tersebut. Bahkan ada pula yang belum mengerjakan apapun.

"Rata-rata hibah itu digunakan untuk membuat palinggih, dan banjar. Ternyata setelah kami lakukan Monev (monitoring dan evaluasi). Ada yang masih dalam pengerjaan, kemudian kemarin itu ada yang belum sama sekali melakukan pembangunan dan mengaku masih melakukan pemesanan palinggih," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, I Nyoman Mudarta, Jumat (26/1).

Berdasarkan Monev yang dilakukan, pihaknya mengungkapkan para penerima hibah yang belum menyetorkan SPJ itu sebagian besar beralasan pengerjaan proyeknya belum selesai karena sulitnya mencari buruh bangunan. Padahal sebelumnya pihaknya sudah mewanti-wanti para penerima hibah untuk mengambil hibah tersebut jika yakin proyek pembangunan yang didanai melalui anggaran hibah dapat terselesaikan tepat waktu dan SPJ disetorkan paling lambat 10 Januari 2018 lalu. Hal itu mengingat pencairan dana hibah baru dilakukan pertengahan November 2017 lalu. "Itu ada yang menerima hibah hingga Rp 200 juta untuk pembangunan bale banjar dan sampai saat ini belum selesai pengerjaannya. Kira-kira baru dikerjakan sekitar 40 persen," terang Mudarta.

Atas kondisi itu pihaknya mengaku akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra. Selain itu pihaknya juga berharap ada peran serta para anggota dewan Kabupaten Klungkung untuk bisa membantu para penerima hibah menyegerakan penyetoran SPJ, mengingat hibah tersebut sebagian besar difasilitasi oleh mereka. "Artinya siapa pun yang memfasilitasi itu kan harus punya tanggung jawab moral. Sebagian besar difasilitasi usulan dewan. Bulan Februari kami akan kembali melakukan Monev," tandasnya. (*gup)

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal. : 2



Pastikan Batas, Hakim Gelar Sidang PS

Terkait Korupsi Pelepasan Aset Tahura

DENPASAR-Sidang perkara dugaan korupsi pelepasan aset lahan taman hutan raya (tahura) dengan terdakwa I Wayan Suwirta dan I Wayan Sudarta alias Agus, Jumat (26/1) kembali digelar. Mengagendakan sidang pemeriksaan setempat (PS), sidang dengan Majelis Hakim pimpinan I Wayan Sukanila dan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Gede Budi Suardana dkk berlangsung di obyek sengketa yakni di kawasan tahura, Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan.

Pantauan di lokasi sidang, selain memeriksa tanah kosong samping sungai yang bersebelahan dengan bangunan Bank Sinarmas, Jaksa dan pihak kuasa hukum terdakwa bersidang di area gedung Bank Sinarmas. Di area gedung berlantai lima ini juga sudah terpasang papan penyitaan atas persetujuan pihak pengadilan.

Kembali ke persidangan, baik jaksa

maupun kuasa hukum terdakwa ditanya perihal kondisi serta letak batas tahura yang kemudian dicocokkan dengan sertifikat. JPU Budi Suardana mengatakan, saat itu juga ditanya soal dasar pengukuran. Pihak tahura menggunakan koordinat sebagai dasar pengukuran dan pihak BPN juga berdasarkan letak dan posisi sesuai permohonan dan didukung saksi.

Sebelumnya, mantan kepala BPN Tri Nugraha saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Denpasar mengatakan tanah yang diklaim sebagai tanah

tahura, adalah sah milik terdakwa Suwirta. "Karena diketahui desa. Yang paling mengetahui kondisi lapangan kan pihak desa," tandas Tri Nugraha. Dia menambahkan bahwa tanah itu tidak berbatasan dengan hutan. Soal keberatan pihak tahura, Tri Nugraha mengatakan bahwa hal itu diuji dalam TUN. Dan di TUN yang diuji bahwa itu milik Suwirta. Karena itu, Tri Nugraha mengatakan sertifikat yang diklaim tanah tahura yang dikantongi Suwirta sampai saat ini sah dan berlaku milik Suwirta. (pra/dot)

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal. : 4



Turun Rp 3 M,

Dana Desa di Gianyar

GIANYAR - Tahun ini, dana desa dari pemerintah pusat untuk kabupaten Gianyar mengalami penurunan. Tahun lalu, dana desa mencapai Rp 55 miliar, sedangkan untuk tahun ini menjadi Rp 51,9 miliar. Dengan penurunan itu, otomatis membuat pendapatan desa juga merosot.

Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa (BPPD) Kabupaten Gianyar I Ketut Suweta, penurunan dana desa lantaran Gianyar tidak memiliki kawasan yang dinyatakan desa tertinggal.

"Di Bali, hanya Denpasar dan Gianyar yang dinyatakan tidak punya kawasan desa tertinggal. Makanya Gianyar dipangkas dana desa-nya," katanya.

Suweta menjabarkan untuk keseluruhan dana yang masuk ke desa bersumber dari beberapa pos. Yakni Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 72 miliar, bagi hasil pajak daerah Rp 53 miliar lebih, bagi hasil retribusi daerah Rp 5 miliar lebih dan dana desa Rp 51 miliar lebih. "Ada juga tambahan yang merupakan inovasi bapak Bupati

Gianyar, berupa Program Siaga Desa Swatantra sebesar Rp 300 juta per desa," terangnya.

Dari empat sumber dana tersebut, setiap desa memperoleh dana hampir mencapai Rp 2 miliar lebih, hanya beberapa desa yang memperoleh dana mencapai Rp 5 miliar. Seperti Desa Pupuan Kecamatan Tegalalang memperoleh dana desa terbanyak mencapai Rp 5,2 miliar. Diikuti Desa Taro yang total memperoleh dana mencapai Rp 4,4 miliar. "Tingginya pen-

galokasian dana bagi Desa Pupuan mempertimbangkan kepadatan penduduk," ungkapnya.

Selama ini penggunaan dana di 64 desa se-Kabupaten Gianyar itu sudah digunakan dengan baik. Bahkan pada 2017 lalu dari Rp 55 miliar dana desa, 93 persen dipastikan sudah terserap dengan baik. "Serapan itu sudah tergolong tinggi, dibandingkan kabupaten lain," terangnya.

Pemkab Gianyar juga membuka warung di kan-

tor BPMD Gianyar yang khusus melayani aparat desa untuk berkonsultasi.

"Kami juga buka aplikasi siskudes (sistem keuangan desa) disana ada barometer meminimalisir kesalahan, mempercepat penyaluran dana, sehingga bisa menuntun aparat desa," tandasnya. BPMD Gianyar juga bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar, untuk ikut serta melakukan pengawasan dana desa. Sementara untuk sosialisasi pihaknya bekerjasama langsung dengan kementerian. (dra/gup)

Edisi : Sabtu, 27 Januari 2018

Hal. : 2



Gaji Dewan Naik Rp 900 Juta

Belanja Dana Hibah Pemprov Tembus Rp 1,2 Triliun

DENPASAR - Memasuki tahun politik, jumlah dana hibah untuk anggota DPRD Bali ternyata ikut melesat tajam. Data yang didapat koran ini, dana hibah untuk satu anggota dewan meningkat dari awalnya menerima 4,5 miliar pada 2017 kini menjadi Rp 5,4 miliar. Sementara anggota yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) mendapat jatah lebih banyak, Rp 5,5 miliar.

Artinya, jika dirata-rata, dari 54 anggota dewan (minus Jero Jangol), maka satu anggota dewan mendapat kenaikan dana hibah Rp 900 juta. Sementara anggota Banggar mendapat kenaikan utuh Rp 1 miliar. Ini karena anggota Banggar yang berusaha keras menggegolkan kenaikan dana hibah. Dengan kenaikan dana hibah tersebut, sesuai dengan APBD 2018, maka belanja hibah Pemprov Bali tembus Rp 1,2 triliun. "Tahun ini saya naik hampir Rp 1 miliar. Ya, lumayan untuk nanti investasi politik di masyarakat. Pas Pileg 2019 lagi nggak

begitu berat," ujar salah seorang anggota DPRD Bali kepada Jawa Pos Radar Bali, kemarin (28/1).

Anggota dewan yang meminta namanya tak dikorbankan itu menambahkan, jumlah dana hibah masih bisa naik jika APBD perubahan 2018 bergulir. Tentu harus ada perjuangan dan lobi-lobi politik. "Sepertinya APBD perubahan nanti kemungkinan besar ada tambahan lagi," imbuhnya.

Menariknya, menurut sumber koran ini, meski sudah mendapat kenaikan dana hibah, ternyata anggota dewan masih berusaha mendapat gelontoran dana hibah dari jalan belakang. Caranya yaitu mengambil jalur biro umum dengan cara meminta bantuan dari pejabat eksekutif. "Apalagi ini tahun politik ada Pilgub Bali. Dana hibah yang diberikan sebisa mungkin bisa berpengaruh saat coblosan nanti," tukasnya.

Sumber koran ini menjelaskan, sesuai aturan semestinya anggota dewan yang membawa proposal dari kelompok masyarakat mengajukan permohonan hibah yang ditujukan pada Gubernur Bali. Pertama, proposal itu dimasukkan ke bagian Biro Umum Setda Bali. Selanjutnya oleh Biro Umum proposal disortir. Proposal kemudian dilanjutkan ke Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sesuai bidangnya.

Misal berkaitan dengan bantuan perbaikan infrastruktur, maka diberikan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Setelah itu, OPD yang memverifikasi administrasi layak atau tidak proposal. Jika layak dilakukan verifikasi faktual ke lapangan. Kalau sudah layak dibuatkan rekomendasi OPD masing-masing, setelah itu baru muncul di APBD. "Tapi faktanya dewan sebagai fasilitator sudah memplot sekian-sekian (angka dan peruntukan hibah, Red). Ini sebenarnya rahasia di balik layar," tukas sumber yang kembali mewanti-wanti namanya tidak dikorbankan.

Bagaimana kalau ada pemeriksaan dari BPK atau BPKP? "Masyarakat sudah dikasih tahu dan dikondisikan. Kalau ada pemeriksaan apa yang harus dijelaskan. Sudah sepakat kok," bebernya.

Sementara itu, Kordinator Banggar DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry saat dikonfirmasi mengatakan tidak ada kenaikan dana hibah. Ditanya apakah ada perubahan angka dari APBD sebelumnya, Sugawa kembali mengatakan tidak ada. "Yang dana hibah APBD induk 2018 itu sudah sesuai kesepakatan, jadi tidak ada kenaikan," jelasnya. **(san/rid)**

Edisi : Senin, 29 Januari 2018

Hal. : 3



Jawa Pos

Gelar Monev SPJ Hibah, Kejari

Terkait 64 Penerima yang Belum Setor SPJ

SEMARAPURA- Berkaitan dengan puluhan penerima bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang belum menyetorkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kejaksaan Negeri Klungkung akan turun melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Pasalnya hal itu dilakukan untuk memastikan penggunaan

dana dari APBD Perubahan 2017 berjalan dengan benar mengingat penggunaan dana tersebut rawan akan penyelewengan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung, Cakra Yuda, Minggu (28/1) menjelaskan, berkaitan dengan 64 penerima bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang belum menyetorkan SPJ-nya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Klungkung sudah bersurat kepada Kejaksaan Negeri Klungkung. Untuk itu, pihaknya akan turun untuk melakukan

Monev. "Sejauh ini monitoring penggunaan dana tersebut baru dilakukan Disbudpora. Dengan adanya surat itu, kami akan turun. Kalau memang ada pelanggaran, kan ada proses lanjutannya lagi," ujarnya.

Sebelum dana hibah itu dicairkan, menurutnya bersama dengan Pemkab Klungkung, penerima hibah sudah diberikan sosialisasi secara langsung dan diwanti-wanti untuk bisa menggunakan dana itu sebaik-baiknya. Hal itu mengingat penggunaan dana tersebut rawan penyelewengan. "Untuk itu kami

juga berharap masyarakat turut melakukan pengawasan," terang pria yang juga menjabat Ketua Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Klungkung itu.

Anggota DPRD Klungkung Sang Nyoman Putrayasa, pun angkat bicara terkait kondisi itu. Setelah turun meninjau proyek hibah yang masih tahap pengerjaan, menurutnya sebagian besar mengalami kendala pada cuaca. Mengingat belakangan ini sering turun hujan deras sehingga masyarakat tidak bisa bekerja. Ini

juga harus menjadi permakluman sepanjang proyek itu dalam tahap pengerjaan sesuai anggaran yang diterima. "Tapi kalau anggaran sudah diterima tetapi tidak dikerjakan, tidak akan kami toleransi," tegasnya. Pihaknya menambahkan terlepas dari siapa yang memfasilitasi hibah tersebut, peran eksekutif dan legislatif harus tetap terus mengawasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta mengungkapkan bahwa pihaknya terus turun ke lapangan untuk

mengecek pengerjaan hibah. Untuk diketahui, dari total 282 penerima hibah, ada sebanyak 64 penerima yang belum menyetorkan SPJ-nya. Padahal Disbudpora Klungkung pasalnya sudah sejak awal mewanti-wanti kepada penerima hibah yang nilainya cukup besar, apabila merasa tidak mampu mengerjakan dengan waktu yang diberikan agar tidak mengambil hibah tersebut. Hal itu mengingat pencairan dana hibah baru dilakukan pertengahan November 2017 lalu sementara SPJ harus disetorkan paling lambat 10 Januari 2018 lalu. (ayu/gup)

Edisi : Senin, 29 Januari 2018
Hal. : 2



Radar Bali

Inventaris Kerusakan, Tetapkan Siaga Bencana

Perbaiki Infrastruktur di Buleleng Bisa Habis Miliaran

BANJAR - Pemerintah Kabupaten Buleleng kini menyatakan bahwa Buleleng masuk dalam masa siaga bencana. Rentetan bencana yang terjadi sejak sepekan terakhir, dikhawatirkan belum mencapai puncak. Mengingat siklus bencana di Bali Utara biasanya mencapai puncak pada bulan Februari.

Hingga kemarin (29/1) pemerintah masih terus menginventarisasi lokasi-lokasi yang terdampak bencana alam. Utamanya akses infrastruktur yang ada di desa-desa.

Sebagian besar infrastruktur yang rusak adalah akses jembatan dan jalan. Akses jalan meliputi ruas Desa Cempaga-Asah Gobleg, Pedawa-Unusan, dan Jalan Raya Munduk. Sementara akses jembatan satu titik ada di Desa Pedawa, dan tiga titik lainnya ada di Desa Gobleg. Itu belum termasuk kerusakan infrastruktur lainnya.

Sejauh ini tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng, baru melakukan penghitungan ker-

usakan infrastruktur di Desa Pedawa. Utamanya ruas jalan Cempaga-Asah Gobleg dan ruas Pedawa-Insakan.

Untuk perbaikan dua titik itu saja, pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta. Itu belum termasuk kerusakan infrastruktur lainnya.

"Khusus jalan Cempaga-Asah Gobleg, kami rencanakan dengan konstruksi pasangan batu dan perkuatan beton bertulang. Tanah cukup labil, volume besar, ketinggian kurang lebih 10 meter dan panjang 20 meter. Itu bisa habis dana Rp 400 juta," kata Suparta saat ditemui di Desa Pedawa, siang kemarin.

Sementara untuk ruas Pedawa-Insakan, konstruksi yang ada saat ini adalah bangunan pelimpah. "Makanya tiap tahun kena banjir. Kami rencanakan buat jembatan permanen. Sementara kami akan lakukan perbaikan gorong-gorong dan senderan, mungkin habis Rp 200 juta. Itu belum terdata semua titik, kami masih hitung dan inventarisasi," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra mengatakan, pemerintah kini tengah fokus membersihkan areal yang tergenang lumpur. Selain itu daerah aliran sungai yang tersumbat pohon, juga harus segera dibersihkan.

"Seperti di Tukad Pamaron

ada rumpun bambu yang halangi jalur air. Ini perlu penanganan segera, biar pulih," kata Sutjidra.

Sutjidra menyatakan, pemerintah masih mengevaluasi apakah perlu mengambil keputusan menetapkan masa tanggap darurat atau tidak. Namun sinyal yang muncul, pemerintah tak akan mengambil keputusan itu, karena bencana dianggap tak separah tahun 2017 lalu.

Kini pemerintah hanya mengambil keputusan menetapkan masa siaga darurat bencana. "Siaga bencana sudah kami tetapkan. Jadi dinas terkait dengan *leading sector* BPBD, dengan meli-

batkan PU, Pemadam Kebakaran, itu selalu siap. Kami sudah koordinasi dengan TNI-Polri, terutama dengan Batalyon Infanteri Raider, agar siap membantu sewaktu-waktu," tegas Sutjidra.

Seperti diberitakan sebelumnya, sepekan terakhir Kabupaten Buleleng dilanda bencana. Awalnya wilayah Kecamatan Banjar dilanda musibah banjir bandang dan tanah longsor pada Selasa pekan lalu. Belakangan wilayah Kecamatan Buleleng dan Sukasada juga turut terkena banjir, yang terjadi pada Jumat lalu. (eps/gup)

Edisi : Selasa, 30 Januari 2018

Hal. : 9